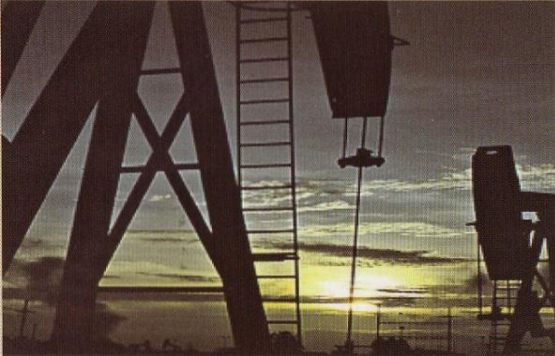




Pemerintah Provinsi Riau

KAJIAN TRANSPARANSI MEKANISME PENERIMAAN DBH YANG DITERIMA PEMERINTAH DAERAH

(Sumber Data LKPP Audit BPK tahun 2013-2016 dan Laporan EITI 2013-2015)

Oleh : AHMAD HIJAZI, SE, M.Si
Sekretaris Daerah Provinsi Riau

Disampaikan pada acara :
FGD EITI INDONESIA
Batam, 09 April 2018



- ✓ Pemerintah Provinsi Riau meminta diberikan akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan DBH Migas.
- ✓ Ada 3 (tiga) landasan hukum menjadi dasar tuntutan tersebut, yaitu :
 1. Adanya Peraturan Pemerintah tentang DBH yang menyebutkan pemerintah pusat melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah daerah (Pasal 28 – PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan “(1) *Penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH SDA Perikanan.* (2) *Dalam realisasi DBH SDA berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari Departemen Teknis.*”
 2. Adanya tuntutan dari kertas kerja rencana aksi Korsubgah KPK Bidang Energi. Dimana diminta untuk membuka data terkoneksi dari SKK Migas, Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan;
 3. Riau yang termasuk sebagai salah satu basis industri transparansi (Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) menuntut supaya bisa mendapatkan akses terhadap sumber daya alam yang keluar dari buminya;
 4. Mendorong untuk mengetahui berapa nilai DBH ril dari pajak bagi hasil kelapa sawit, CPO dan kalau memungkinkan juga terhadap pajak perkebunan.

Dalam menghitung alokasi lifting Migas dan DBH SDA dasar hukum yang harus diperhatikan adalah:

1. UU No. 22 TAHUN 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 33 TAHUN 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. PP No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.
6. PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.
8. **PMK No 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.**

3

DANA PERIMBANGAN/DANA TRANSFER KE DAERAH (Jenis-Jenis Dana Bagi Hasil (DBH))

a. DBH Pajak :

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Bea Perolehan Atas Tanah dan bangunan (BPHTB)
3. PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPODN) dan PPh pasal 21.

b. DBH Sumber Daya Alam:

1. Kehutanan;
2. Pertambangan Umum;
3. Perikanan;
4. Pertambangan Minyak Bumi;
5. Pertambangan Gas Bumi;
6. Pertambangan Panas Bumi.



a. Dana Bagi Hasil Pajak.

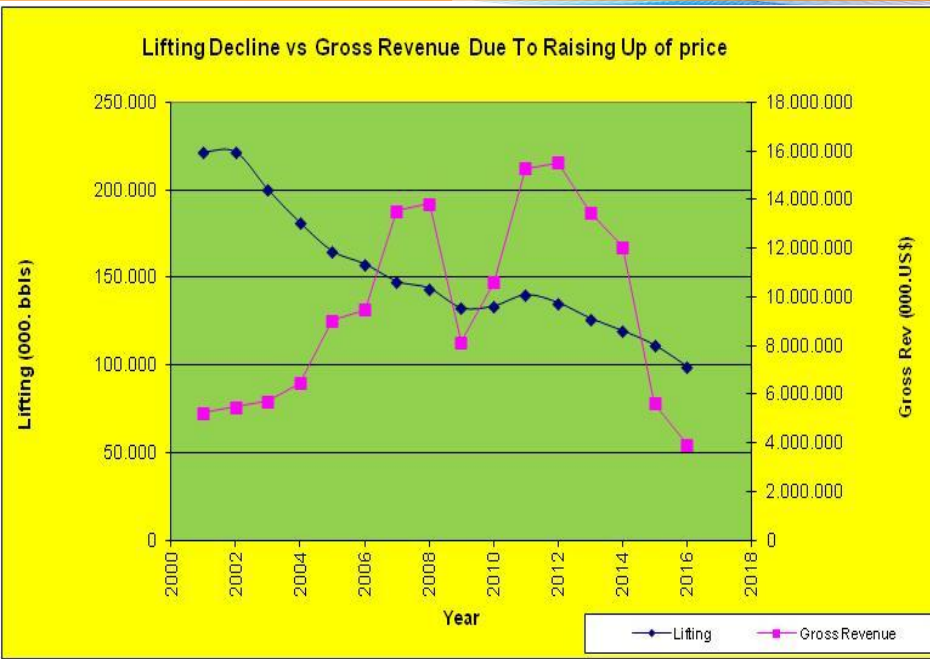
- 1). Penyaluran yang tidak tepat waktu
- 2). Perbedaan Perhitungan Penetapan (PBB Migas) sebagai Komponen Pengurang

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

- 1). Penyaluran yang Tidak Tepat waktu
- 2). Penetapan Daerah Penghasil Migas dan Pembagian Alokasi DBH Migas tidak konsisten
- 3). Pembebanan Pajak dan Pungutan Lain Belum Konsisten
- 4). Penghitungan Penetapan Rampung DBH Migas belum dilakukan
- 5). Perhitungan Lebih Salur dan Kurang Salur Belum Transparan
- 6). Jumlah DBH yang disalurkan dalam Penetapan Dana Alokasi umum Sebagai Kapasitas Fiskal, Mengurangi Penetapan DAU Untuk Daerah, Sementara Jumlah DBH yang Disalurkan Setiap Tahun Belum Menggambarkan Kondisi Riil (Lebih Salur/ Kurang Salur).

Catatan : Penetapan DAU Tahun 2018 Menggunakan DBH SDA Tahun 2016, Sebagai Kapasitas Fiskal yang Lebih Salur, Sehingga Penurunan DAU menjadi Besar.

No	Tahun	Lifting (ribu. bbls)	Decl. Rate (%)	WAP (US\$/Bbl)	WAP Incl (%)	Gross Revenue (ribu. US\$)
1	2001	222.113,00		23,58		5.237.942,80
2	2002	221.930,73	-0,08%	24,73	4,87%	5.488.679,85
3	2003	200.328,23	-9,73%	28,64	15,81%	5.737.467,28
4	2004	181.302,30	-9,50%	35,67	24,54%	6.466.932,17
5	2005	165.043,08	-8,97%	54,64	53,18%	9.017.953,89
6	2006	157.765,42	-4,41%	60,15	10,08%	9.489.590,01
7	2007	147.717,95	-6,37%	91,54	52,19%	13.522.101,14
8	2008	143.793,35	-2,66%	96,13	5,01%	13.822.854,74
9	2009	132.484,65	-7,86%	61,58	-35,94%	8.158.404,75
10	2010	133.590,63	0,83%	79,40	28,94%	10.607.096,02
11	2011	140.049,48	4,83%	111,55	40,49%	15.287.890,31
12	2012	135.474,06	-3,27%	112,73	1,06%	15.523.055,11
13	2013	126.556,61	-6,58%	105,84	-6,11%	13.484.917,17
14	2014	119.433,08	-5,63%	96,51	-8,82%	12.073.991,67
15	2015	111.064,88	-7,01%	50,71	-47,46%	5.631.984,22
16	2016	98.892,76	-10,96%	39,64	-21,83%	3.920.542,97
17	2017	88.335,02	-10,68%	48,36	22,00%	1.113.282,77
18	2018					
Jumlah /Average		2.525.875,22	-6,54%	70,19	21,70%	143.918.876,93



- Sejak tahun 2001 s/d 2009 lifting minyak bumi cenderung mengalami penurunan rata-rata 6% pertahun dan hanya pada tahun 2010 -2011 mengalami kenaikan,;
- Kemudian mulai tahun 2012 lifting minyak Bumi terus mengalami penurunan sampai dengan sekarang;
- Harga minyak mentah mengalami kenaikan dari tahun 2001 s/d 2008 dan pada tahun 2009 turun 35,94%, kemudian naik dari tahun 2010-2013 selanjutnya terjun bebas hingga sekarang.

DANA BAGI HASIL PAJAK

(Penyaluran yang tidak tepat waktu Tahun 2016 -keterlambatan sampai 37 bulan)

NO	PERIODE		TANGGAL PENYALURAN	REALISASI DBH PBB (Rp)	SELISIH	LAMANYA KETERLAMBATAN	KETERANGAN
	PENYALURAN	URAIAN					
1	APBN 2016	Alokasi DBH PBB Migas 2016	27-Nop-15	526.193.125.000,00			Perpres No. 137 Tahun 2015 Tanggal 27 November 2015
		JUMLAH		526.193.125.000,00	-		
2	APBNP 2016	Perubahan Alokasi DBH PBB Migas 2016	29-Jul-16	480.210.571.000,00			Perpres No. 66 Tahun 2016 Tanggal 29 Juli 2016
		JUMLAH		480.210.571.000,00	-		
3	TRIWULAN I	DBH PBB Migas 2016	26 Jan 16	131.548.281.250,00		- 0 - Bulan	
4	TRIWULAN I	Kurang Bayar DBH PBB Migas 2014	29 Jan 16	26.490.897.170,00		- 25 - Bulan	PMK. 4/PMK.07/2016 tgl. 25 Januari 2016
5	TRIWULAN I	Kurang Bayar DBH PBB Migas 2013	01 Feb 16	349.706.778,00		- 37 - Bulan	
6	TRIWULAN II	DBH PBB Migas 2016	30 Mei 16	131.548.281.250,00		- 0 - Bulan	
7	TRIWULAN III	DBH PBB Migas 2016	30 Sep 16	73.050.837.200,00		- 0 - Bulan	
8	TRIWULAN IV	DBH PBB Migas 2016		-			
TOTAL				362.988.003.648,00			
A	TW I/2016	Alokasi 25% PMK		131.548.281.250,00			
B	TW II/2016	Alokasi 25% PMK		131.548.281.250,00			
C	TW III/2016	Alokasi 30% PMK		73.050.837.200,00			
D	TW IV/2016	Alokasi 20% PMK		-			
JUMLAH REALISASI DBH PBB MIGAS TA. 2016				70,00	336.147.399.700,00		
		PMK No. 208/PMK.07/2016	29-Des-16	480.210.571.000,00	144.063.171.300,00		

✓ Pasal 29 ayat (2) P P no. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang Menyatakan *Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Dilaksanakan Secara Triwulanan, Namun Dalam Pelaksanaannya Penyaluran ke Daerah Terus Mengalami Keterlambatan.*

✓ Penyaluran DBH Migas triwulan IV ke Daerah setelah tanggal 20 desember, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam tahun berjalan dan menjadi sisa lebih anggaran (SILPA)



7

DANA BAGI HASIL PAJAK (Permasalahan PBB MIGAS)

- ✓ Pembebanan PBB MIGAS sebagai Komponen Pengurang Lebih Besar (PNBP-DJA), sehingga Mengurangi DBH Migas Bagian Daerah. Sedangkan penyaluran DBH Pajak -PBB Migas (DJPK) belum sesuai yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang, yaitu sebesar 90%.
- ✓ Prakiraan Perhitungan PBB Migas sebagai komponen pengurang (2013-2017) sebesar Rp.15,619 T, Bagian Pemerintah sebesar 10% atau 1,56 T, disalurkan Bagian Daerah sebesar 76,83% atau Rp. 12,00 T, maka masih ada selisih yang belum diperhitungkan merupakan **bagian Daerah sebesar 2,056 T**

No	TAHUN	PBB MIGAS				SELISIH	
		Faktor Pengurang	Bagian Pemerintah (10%)	Penyaluran Bagian Daerah (90%)		Kurang Salur	
					%		
1	2013	2.833.337,51	283.333,75	1.670.161,41	58,9%	879.842,36	31,1%
2	2014	3.517.948,00	351.794,80	2.293.319,54	65,2%	872.833,66	24,8%
3	2015	3.958.989,00	395.898,90	3.535.220,79	89,3%	27.869,31	0,70%
4	2016*)	2.674.459,71	267.445,97	2.373.795,09	88,8%	33.218,64	1,24%
5	2017*)	2.634.470,64	263.447,06	2.127.963,93	80,8%	243.059,64	9,23%
Total		15.619.204,86	1.561.920,49	12.000.460,77	76,8%	2.056.823,61	13,17%



DANA BAGI HASIL MIGAS

(Penyaluran yang tidak tepat waktu tahun 2015-keterlambatan sampai 25 bulan)

NO	PERIODE		TANGGAL PENYALURAN	REALISASI		JUMLAH (Rp)	SELISIH	LAMANYA KETERLAMBATAN	KETERANGAN
	PENYALURAN	URAIAN		MINYAK BUMI (Rp)	GAS BUMI (Rp)				
1	APBN 2017	Alokasi DBH 15% 2017	30-Nop-16	678.865.276.000,00	-	678.865.276.000,00			
2	APBN 2017	Alokasi DBH 0,5% 2017	30-Nop-16	22.628.843.000,00	-	22.628.843.000,00			
3	APBN 2017	Alokasi DBH 30% 2017	30-Nop-16	-	23.478.959.000,00	23.478.959.000,00			
4	APBN 2017	Alokasi DBH 0,5% 2017	30-Nop-16	-	391.316.000,00	391.316.000,00			
		JUMLAH		701.494.119.000,00	23.870.275.000,00	725.364.394.000,00	-		
5	APBNP 2017	Perubahan Alokasi DBH 15% 2017	30-Agust-17	778.082.568.000,00	-	778.082.568.000,00			
6	APBNP 2017	Perubahan Alokasi DBH 0,5% 2017	30-Agust-17	25.936.086.000,00	-	25.936.086.000,00			
7	APBNP 2017	Perubahan Alokasi DBH 30% 2017	30-Agust-17	-	25.513.388.000,00	25.513.388.000,00			Perpres No. 86 Tahun 2014 Tanggal 30 Agustus 2017
8	APBNP 2017	Perubahan Alokasi DBH 0,5% 2017	30-Agust-17	-	425.223.000,00	425.223.000,00			
		JUMLAH		804.018.654.000,00	25.938.611.000,00	829.957.265.000,00	-		
9	TRIWULAN I	Kurang Bayar DBH minyak bumi 15% 2015	24-Feb-17	153.812.100.611,00	-	153.812.100.611,00		25 - Bulan	PMK No. 19/PMK.07/2017 Tanggal 28 Oktober 2017
10	TRIWULAN I	Kurang Bayar DBH gas minyak 0,5% 2015	23-Feb-17	5.127.070.010,00	-	5.127.070.010,00		25 - Bulan	
11	TRIWULAN I	Kurang Bayar DBH gas bumi 30% 2015	23-Feb-17	-	14.675.868.171,00	14.675.868.171,00		25 - Bulan	
12	TRIWULAN I	Kurang Bayar DBH gas bumi 0,5% 2015	23-Feb-17	-	311.474.199,00	311.474.199,00		25 - Bulan	
13	TRIWULAN I	DBH minyak bumi 15% 2017	30-Mar-17	169.716.319.000,00	-	169.716.319.000,00		0 - Bulan	
14	TRIWULAN I	DBH minyak bumi 0,5% 2017	30-Mar-17	5.657.210.750,00	-	5.657.210.750,00		0 - Bulan	
15	TRIWULAN I	DBH gas bumi 30% 2017	30-Mar-17	-	5.869.739.750,00	5.869.739.750,00		0 - Bulan	
16	TRIWULAN I	DBH gas bumi 0,5% 2017	30-Mar-17	-	97.829.000,00	97.829.000,00		0 - Bulan	
	TRIWULAN I	Potongan Lebih Salur DBH minyak bumi 15% 2015	30-Mar-17	(41.580.874.298,00)	-	(41.580.874.298,00)		0 - Bulan	Perdirjen PK No. PER-4/ PK/2016 TANGGAL 23 Mei 2016
17	TRIWULAN II	DBH minyak bumi 15% 2017	12-Jun-17	169.716.319.000,00	-	169.716.319.000,00		0 - Bulan	
18	TRIWULAN II	DBH minyak bumi 0,5% 2017	12-Jun-17	5.657.210.750,00	-	5.657.210.750,00		0 - Bulan	
19	TRIWULAN II	DBH gas bumi 30% 2017	15-Jun-17	-	5.869.739.750,00	5.869.739.750,00		0 - Bulan	
20	TRIWULAN II	DBH gas bumi 0,5% 2017	15-Jun-17	-	97.829.000,00	97.829.000,00		0 - Bulan	
21	TRIWULAN II	DBH gas bumi 0,5% 2017	25-Sep-17	205.225.159.600,00	-	205.225.159.600,00		0 - Bulan	
22	TRIWULAN III	DBH minyak bumi 15% 2017	25-Sep-17	6.840.838.700,00	-	6.840.838.700,00		0 - Bulan	
23	TRIWULAN III	DBH minyak bumi 0,5% 2017	25-Sep-17	-	6.119.892.100,00	6.119.892.100,00		0 - Bulan	
24	TRIWULAN III	DBH gas bumi 15% 2017	25-Sep-17	-	101.998.100,00	101.998.100,00		0 - Bulan	
25	TRIWULAN III	DBH gas bumi 0,5% 2017	25-Sep-17	-	1.631.864.521,00	1.631.864.521,00		35 - Bulan	PMK No. 144/PMK.07/2017 Tanggal 23 Oktober 2017
26	TRIWULAN IV	Kurang Bayar 2015 Gas Bumi 30%	01-Nop-17	-	7.331.321.705,00	7.331.321.705,00		36 - Bulan	PMK No. 187/PMK.07/2017 Tanggal 8 Desember 2017
27	TRIWULAN IV	Kurang Bayar 2015 Gas Bumi 30%	21-Des-17	-	122.188.228,00	122.188.228,00		36 - Bulan	
28	TRIWULAN IV	Kurang Bayar 2015 Gas Bumi 0,5%	21-Des-17	-	-	-			
	TOTAL			680.171.354.123,00	42.229.744.524,00	722.401.098.647,00			
A	TW I/2016	Alokasi 25% PMK	30-Mar-17	175.373.529.750,00	5.967.568.750,00	181.341.098.500,00			
B	TW II/2016	Alokasi 25% PMK	12-Jun-17	175.373.529.750,00	5.967.568.750,00	181.341.098.500,00			
C	TW III/2016	Alokasi 20% PMK	25-Sep-17	212.065.998.300,00	6.221.890.200,00	218.287.888.500,00			
D	TW IV/2016	Alokasi 0% PMK		-	-	-			
	JUMLAH REALISASI DBH MIGAS TA. 2017		99,45	562.813.057.800,00	18.157.027.700,00	580.970.085.500,00			
		PMK No. 187/PMK.07/2017	08-Des-17	562.813.057.800,00	21.359.863.342,00	584.172.921.142,00	3.202.835.642,00		

✓ Pasal 29 ayat (2) P P no. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang Menyatakan **Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Dilaksanakan Secara Triwulanan, Namun Dalam Pelaksanaannya Penyaluran ke Daerah Terus Mengalami Keterlambatan.**

✓ Penyaluran DBH Migas triwulan IV ke Daerah setelah tanggal 20 desember, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam tahun berjalan dan menjadi sisa lebih anggaran (SILPA)

DANA BAGI HASIL MINERBA

(Penyaluran yang tidak tepat waktu tahun 2015 -keterlambatan sampai 26 bulan)

NO	PERIODE		TANGGAL PENYALURAN	REALISASI		JUMLAH	SELISIH	LAMANYA KETERLAMBATAN	KETERANGAN
	PENYALURAN	URAIAN		LANDRENT (Rp)	ROYALTI (Rp)				
1	APBN 2017	Alokasi DBH Minerba Landrent 2017	30-Nop-16	3.097.903.000,00	-	3.097.903.000,00			Perpres No. 97/2016 Tgl 30 November 2016
2	APBN 2017	Alokasi DBH Minerba Royalti 2017	30-Nop-16	-	4.734.247.000,00	4.734.247.000,00			
		JUMLAH		3.097.903.000,00	4.734.247.000,00	7.832.150.000,00	-		
3	APBNP 2017	Perubahan Alokasi DBH Minerba Landrent 2017	30-Agust-17	3.405.231.000,00	-	3.405.231.000,00			Perpres No. 86/2014 Tgl 30 Agustus 2017
4	APBNP 2017	Perubahan Alokasi DBH Minerba Royalti 2017	30-Agust-17	-	3.160.979.000,00	3.160.979.000,00			
		JUMLAH		3.405.231.000,00	3.160.979.000,00	6.566.210.000,00	-		
5	TRIWULAN I	DBH Minerba Landrent 2017	20-Feb-17	774.475.750,00	-	774.475.750,00		0 - Bulan	PMK No. 19/PMK.07/2017 Tgl 28 Oktober 2017
6	TRIWULAN I	DBH Minerba Royalti 2017	20-Feb-17	-	1.183.561.750,00	1.183.561.750,00		0 - Bulan	
7	TRIWULAN I	Kurang Bayar DBH Minerba Landrent s/d Tahun 2015	23-Feb-17	158.796.709,00	-	158.796.709,00		26 - Bulan	
8	TRIWULAN I	Kurang Bayar DBH Minerba Royalti s/d Tahun 2015	23-Feb-17	-	22.095.294,00	22.095.294,00		26 - Bulan	
10	TRIWULAN II	DBH Minerba Landrent 2017	12-Jun-17	774.475.750,00	-	774.475.750,00		0 - Bulan	
11	TRIWULAN II	DBH Minerba Royalti 2017	12-Jun-17	-	1.183.561.750,00	1.183.561.750,00		0 - Bulan	
12	TRIWULAN III	DBH Minerba Landrent 2017	25-Sep-17	834.710.200,00	-	834.710.200,00		0 - Bulan	
13	TRIWULAN III	DBH Minerba Royalti 2017	25-Sep-17	-	-	-		0 - Bulan	
14	TRIWULAN IV	DBH Minerba Landrent 2017		-	-	-		0 - Bulan	
15	TRIWULAN IV	DBH Minerba Royalti 2017		-	-	-		0 - Bulan	
		TOTAL		2.542.458.409,00	2.389.218.794,00	4.931.677.203,00			
A	TW I/2016	Alokasi 25% PMK	20-Feb-17	774.475.750,00	1.183.561.750,00	1.958.037.500,00			
B	TW II/2016	Alokasi 25% PMK	12-Jun-17	774.475.750,00	1.183.561.750,00	1.958.037.500,00			
C	TW III/2016	Alokasi 20% PMK	25-Sep-17	834.710.200,00	-	834.710.200,00			
D	TW IV/2016	Alokasi 0% PMK		-	-	-			
		JUMLAH REALISASI DBH SDA MINERBA TA. 2017	71,54	2.383.661.700,00	2.367.123.500,00	4.750.785.200,00			
		PMK No. 187/PMK.07/2017	08-Des-17	2.383.661.700,00	4.256.698.299,00	6.640.359.999,00	1.889.574.799,00		

✓ Pasal 29 ayat (2) P P no. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang Menyatakan Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Dilaksanakan Secara Triwulanan, Namun Dalam Pelaksanaannya Penyaluran ke Daerah Terus Mengalami Keterlambatan.

✓ Penyaluran DBH Migas triwulan IV ke Daerah setelah tanggal 20 desember, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam tahun berjalan dan menjadi sisa lebih anggaran (SILPA)



DANA BAGI HASIL MIGAS

(Penetapan Daerah Penghasil Migas Dan Alokasi DBH Migas belum Konsisten)

No	PROV/ KAB/ KOTA	ALOKASI MINYAK BUMI TAHUN 2017
		PERPRES NO. 97 TAHUN 2016 TANGGAL 30 NOVEMBER 2016 LAMPIRAN IX
1	2	3
1	Bagian Propinsi	701.494.119.000,00
2	Kab. Bengkalis	735.178.740.000,00
3	Kab. Indragiri Hilir	127.544.385.000,00
4	Kab. Indragiri Hulu	130.901.226.000,00
5	Kab. Kampar	289.874.448.000,00
6	Kab. Kuantan Singingi	127.544.385.000,00
7	Kab. Pelalawan	131.430.113.000,00
8	Kab. Rokan Hilir	392.301.721.000,00
9	Kab. Rokan Hulu	133.153.183.000,00
10	Kab. Siak	355.415.118.000,00
11	Kota Dumai	127.544.385.000,00
12	Kota Pekanbaru	127.544.385.000,00
13	Kab. Kepulauan Meranti	127.544.385.000,00
JUMLAH.....		3.507.470.593.000,00

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2017 PROVINSI RIAU KEPMEN ESDM NOMOR 8003 K/80 /MEM/2016 Tanggal 23 Desember 2016			
NO.	KABUPATEN	MINYAK BUMI	GAS BUMI
		JUMLAH (RIBU BAREL)	JUMLAH (RIBU MMBTU)
1	2	3	4
1	Kab. Bengkalis	44.485,82	-
2	Kab. Indragiri Hulu	589,60	-
3	Kab. Kampar	10.772,76	3.782,57
4	Kab. Rokan Hulu	816,69	-
5	Kab. Rokan Hilir	17.527,55	-
6	Kab. Siak	15.766,56	5.631,90
7	Kab. Pelalawan	480,83	16.404,53
8	Kab. Kep. Meranti	1.172,39	1.081,18
Total		91.612,20	26.900,18

Pasal 27 - PP No. 55/2005

1. Menteri Teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan SDA paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
2. Dalam hal SDA berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Mendagri menetapkan daerah penghasil SDA berdasarkan pertimbangan Menteri Teknis terkait paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari menteri teknis.
3. Ketetapan Mendagri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi dasar penghitungan DBH SDA oleh Menteri Teknis.
4. Ketetapan Menteri Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan ke Menteri Keuangan.
5. Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH SDA untuk masing-masing daerah paling lambat 30 hari setelah diterimanya ketetapan dari Menteri Teknis.
6. Perkiraan alokasi DBH SDA minyak bumi dan/atau gas bumi untuk masing-masing daerah ditetapkan paling lambat 30 hari setelah menerima ketetapan dari Menteri Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perkiraan bagian pemerintah, dan perkiraan unsur-unsur pengurang lainnya



KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL MIGAS

ASUMSI MAKRO

REALISASI Tahun Anggaran 2013-2017

NO	URAIAN		2013	2014	2015	2016	2017
1.	PRODUKSI (bbls/day)	NASIONAL	825.250,00	794.000,00	779.000,00	829.180,00	804.000,00
		RIAU	355.187,00	336.480,00	304.886,24	270.787,34	250.488,02
2.	LIFTING (bbls)	NASIONAL	301.219.900,00	317.550.000,00	229.868.577,04	303.478.848,31	293.426.965,24
		RIAU	126.556.611,00	119.433.077,74	111.064.878,07	98.892.755,91	88.472.220,72
3.	HARGA MINYAK/	NASIONAL	105,82	100,48	51,21	40,20	51,19
		RIAU	106,55	101,09	50,71	39,64	50,99
4.	NILAI TUKAR (Rp/US\$)	NASIONAL	10.503,67	11.760,06	13.320,60	13.436,00	13.401,20
		RIAU	10.217,64	11.760,06	13.320,60	13.331,00	13.401,20

KOMPONEN PENGURANG DAN PUNGUTAN LAINNYA DALAM LAPORAN REKENING MIGAS NOMOR 600.000.411980 (LKPP 2013-2016 HASIL AUDIT BPK)

NO	URAIAN	FAKT. PENGURANG 2013		2013		2014		2015		2016	
		%	Rp. Juta	Rp. Juta	US\$	Rp. Juta	US\$	Rp. Juta	US\$	Rp. Juta	US\$
1	Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda via BO III	13,85%	2.872.353,48	20.745.751,75	1.802.624.546,55	18.668.960,20	1.562.018.530,51	15.049.833,32	1.040.271.196,75	1.123.600,81	83.766.415,05
2	Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	71,67%	70.477,76	98.330,85	9.121.599,65	60.631,05	5.056.983,49	52.105,66	3.810.473,97	48.539,50	3.594.921,46
3	Reimbursement PPN ke Kontraktor	10,08%	1.120.072,72	11.112.063,92	1.092.795.043,65	13.792.900,12	1.162.463.352,34	10.449.918,91	795.417.448,75	14.588.867,16	1.093.359.250,07
4	Pembayaran DMO Fee KKKS d)	65,62%	8.355.026,38	12.731.608,94	1.183.789.547,10	16.002.995,84	1.344.218.646,80	5.873.183,58	436.823.787,15	6.939.928,93	523.454.796,23
5	Pembayaran Fee / Anggaran SKK Migas	29,60%	544.393,34	1.839.289,61	182.479.765,68	1.837.704,12	156.738.341,72				
6	Pembayaran Underlifting KKKS e)	-	-	495.100,20	46.472.678,89	1.620.737,06	135.950.985,26	4.513.333,49	333.748.824,28	3.597.789,22	271.428.076,61
7	Pembayaran Fee penjualan PT Pertamina (Persero)			-	-	-	-	2.130.536,53	156.209.145,22	734.693,85	54.743.378,26
	TOTAL	29,60%	12.962.323,68	47.022.145,27	4.317.283.181,52	51.983.928,39	4.366.446.840,12	38.068.911,49	2.766.280.876,12	27.033.419,47	2.030.346.837,68

- Komponen pengurang 2013 (warna merah) adalah faktor pengurang yang menjadi dasar penghitungan DBH MIGAS tahun 2013;
- Fee penjualan minyak mentah tahun 2011 s.d. 2014, sampai dengan periode 31 Desember 2015 belum dilakukan penagihan oleh SKK Migas kepada DJA-KEMENKEU;
- FEE Kegiatan Hulu Migas/SKKMIGAS sudah masuk dalam APBN mulai tahun 2015-2016 sampai dengan sekarang;
- Sedangkan FEE Penjualan dan Pengolahan Minyak Mentah Bagian Indonesia dibayarkan kepada PT. Pertamina (Persero) mulai 2015-2016 sampai sekarang.



KOMPONEN PENGURANG DALAM PERHITUNGAN DBH MIGAS DAN PUNGUTAN LAINYA TAHUN 2013-2017

No	TAHUN	PBB (Juta Rp)	PPN (Juta Rp)	PDRD (Juta Rp)	FEE PENJUALAN (Juta Rp)
1	2013	2.833.337,51	1.133.647,94	70.398,04	544.493,86
2	2014	3.517.948,00	1.249.263,00	42.062,00	489.722,69
3	2015	3.958.989,00	1.367.927,00	36.681,00	454.552,48
4	2016*)	2.674.459,71	1.137.096,80	35.658,22	338.664,90
5	2017*)	2.634.470,64	1.351.497,05	36.690,31	413.273,12
Total		15.619.204,86	6.239.431,78	221.489,57	2.240.707,05

Sumber Data :

1. LKPP 2013-2016 HASIL AUDIT BPK (Laporan Rekening Migas Nomor 600.000.411980);
2. Laporan EITI Indonesia tahun 2013-2015
3. FEE PENJUALAN merupakan pungutan lainnya yang besarannya belum transparan.
4. PDRD penyalurannya terhambat akibat DJA-KEMENKEU belum mau menerima ketentuan Nilai Perolehan Air (AIR) yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Riau.
5. PPN besarannya tidak bisa diperkirakan dan belum transparan;
6. PBB MIGAS merupakan dana bagi hasil pajak yang harus kembalikan ke daerah sebesar 90% sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKEMA EVALUASI PERKIRAAN PERHITUNGAN DBH MIGAS TAHUN 2013



LIFTING

126.556.610,49 (bbbls)

GROSS REV

13.484.917.056,22 (US\$)

ICP

106,55 US\$

KURS

Rp. 10.217,64

BAG. INDONESIA

73.397.676,05 (bbbls)

7.434.047.236,99 (US\$)

BAG. INDONESIA + DMO

Rp. 87.424.841.549.778,70

DMO

Rp. 8.218.673.808.139,31

OVER/UNDERLIF

Rp. 2.899.428.975.102,48

KOMPONEN PENGURANG

FEE PJ : Rp. 489.722.686.000,00

PPN : Rp. 1.266.005.546.379,93

PBB : Rp. 3.546.080.129.484,52

PDRD : Rp. 42.087.317.992,47

PNBP (NETO)

Rp. 76.795.817.419.772,97

BAGIAN PUSAT (85 %)

Rp. 63.678.573.150.630,40

PROVINSI (3 %)

Rp. 2.322.395.020.787,70

KAB. PENGHASIL (6 %)

1. KAB. BENGKALIS :
Rp. 2.495.779.179.219,40

2. KAB. INDRAGIRI HULU :
Rp. 435.467.200.799,94

3. KAB. KAMPAR :
Rp. 979.489.789.905,16

4. KAB. PELALAWAN :
Rp. 438.364.892.478,24

5. KAB. ROKAN HILIR :
Rp. 1.138.162.629.057,81

6. KAB. ROKAN HULU :
Rp. 433.288.119.601,05

7. KAB. SIAK :
Rp. 1.212.961.343.388,18

8. KAB. KEP MERANTI :
Rp. 467.052.368.128,15

KAB. LAINNYA (6 %)

1. KAB. INDRAGIRI HILIR :
Rp. 422.253.640.143,22

2. KAB. KUANTAN SINGINGI :
Rp. 422.253.640.143,22

3. KOTA DUMAI :
Rp. 422.253.640.143,22

4. KOTA PEKANBARU :
Rp. 422.253.640.143,22

BAG. KONTRAKTOR

48.487.527,44 (bbbls)

5.158.611.784,21 (US\$)

HASIL PERKIRAAN PERHITUNGAN DBH MIGAS PERIODE (DESEMBER 2012-NOVEMBER 2013) TAHUN 2013

URAIAN	SATUAN	PERUBAHAN ALOKASI PMK NO. 189/PMK.07/2013 Tanggal 13 Des 2013	KURANG BAYAR PMK NO. 58/PMK.07/2014 Tanggal 18 Maret 2014	KURANG BAYAR PMK NO. 214/PMK.07/2014 Tanggal 3 Desember 2014	TOTAL REALISASI PENYALURAN DBH MIGAS TAHUN 2013	PERKIRAAN PERHITUNGAN DINAS ESDM	PERKIRAAN SISA DBH MIGAS	%	%
Harga Jual /ICP	(US\$)					106,55			
Kurs	(Rp)					10.217,64			
Lifting Migas	(Ribu. bbls)					126.556.611,00			
DBH MIGAS RIAU	(Juta. Rp)	8.308.663,44	2.234.121,61	1.065.747,76	11.608.532,81	11.611.975,10	(3.442,29)	100,03%	-0,03%
Provinsi Riau	(Juta. Rp)	1.661.732,69	446.824,32	213.149,55	2.321.706,56	2.322.395,02	(688,46)	100,03%	-0,03%
1 Kab. Bengkalis	(Juta. Rp)	1.788.802,51	478.562,03	228.289,46	2.495.654,00	2.495.779,18	(125,17)	100,01%	-0,01%
2 Kab. Indragiri Hilir	(Juta. Rp)	302.133,22	81.240,79	38.754,46	422.128,47	422.253,64	(125,17)	100,03%	-0,03%
3 Kab. Indragiri Hulu	(Juta. Rp)	309.840,35	84.725,18	40.416,63	434.982,16	435.467,20	(485,04)	100,11%	-0,11%
4 Kab. Kampar	(Juta. Rp)	703.231,13	186.951,58	89.181,91	979.364,62	979.489,79	(125,17)	100,01%	-0,01%
5 Kab. Kuantan Singingi	(Juta. Rp)	302.133,22	81.240,79	38.754,46	422.128,47	422.253,64	(125,17)	100,03%	-0,03%
6 Kab. Pelalawan	(Juta. Rp)	311.821,51	84.985,51	40.540,82	437.347,84	438.364,89	(1.017,05)	100,23%	-0,23%
7 Kab. Rokan Hilir	(Juta. Rp)	810.125,44	222.007,37	105.904,65	1.138.037,45	1.138.162,63	(125,17)	100,01%	-0,01%
8 Kab. Rokan Hulu	(Juta. Rp)	309.028,77	84.042,98	40.091,20	433.162,95	433.288,12	(125,17)	100,03%	-0,03%
9 Kab. Siak	(Juta. Rp)	874.169,94	229.288,33	109.377,90	1.212.836,17	1.212.961,34	(125,17)	100,01%	-0,01%
10 Kota Dumai	(Juta. Rp)	302.133,22	81.240,79	38.754,46	422.128,47	422.253,64	(125,17)	100,03%	-0,03%
11 Kota Pekanbaru	(Juta. Rp)	302.133,22	81.240,79	38.754,46	422.128,47	422.253,64	(125,17)	100,03%	-0,03%
12 Kab. Kepulauan Meranti	(Juta. Rp)	331.378,24	91.771,16	43.777,79	466.927,19	467.052,37	(125,17)	100,03%	-0,03%

SKEMA EVALUASI PERKIRAAN PERHITUNGAN DBH MIGAS TAHUN 2014



LIFTING

119.433.077,74 (bbbls)

GROSS REV

12.073.991.668,27 (US\$)

ICP

101,09 US\$

KURS

Rp. 11.760,06

BAG. INDONESIA

78.069.083,05 (bbbls)

8.326.305.272,01 (US\$)

BAG. INDONESIA + DMO

Rp. 84.827.040.021.457,20

DMO

Rp. 8.355.026.387.615,36

OVER/UNDERLIF

Rp. 2.923.643.801.072,98

KOMPONEN PENGURANG

FEE PJ : Rp. 544.493.864.888,21

PPN : Rp. 1.133.647.936.828,40

PBB : Rp. 2.833.337.513.880,12

PDRD : Rp. 70.398.041.954,39

PNBP (NETO)

Rp. 76.795.817.419.772,90

BAGIAN PUSAT (85 %)

Rp. 65.276.444.806.806,90

PROVINSI (3 %)

Rp. 2.380.670.340.012,96

KAB. PENGHASIL (6 %)

1. KAB. BENGKALIS :
Rp. 2.524.895.049.120,50

2. KAB. INDRAGIRI HULU :
Rp. 452.318.311.234,31

3. KAB. KAMPAR :
Rp. 985.161.254.125,43

4. KAB. PELALAWAN :
Rp. 461.216.640.113,60

5. KAB. ROKAN HILIR :
Rp. 1.227.157.146.557,85

6. KAB. ROKAN HULU :
Rp. 448.099.433.113,46

7. KAB. SIAK :
Rp. 1.218.549.081.875,87

8. KAB. KEP MERANTI :
Rp. 473.887.832.992,30

KAB. LAINNYA (6 %)

1. KAB. INDRAGIRI HILIR :
Rp. 432.849.152.729,63

2. KAB. KUANTAN SINGINGI :
Rp. 432.849.152.729,63

3. KOTA DUMAI :
Rp. 432.849.152.729,63

4. KOTA PEKANBARU :
Rp. 432.849.152.729,63

BAG. KONTRAKTOR

46.035.401,09 (bbbls)

4.638.360.030,16 (US\$)

HASIL PERKIRAAN PERHITUNGAN DBH MIGAS PERIODE (DESEMBER 2013-NOVEMBER 2014) TAHUN 2014

URAIAN	SATUAN	PMK No.82 /PMK.07/2014 TGL 12 Mei 2014	PMK No.230 /PMK.07/2014 TGL 22 Des 2014	KURANG BAYAR PMK NO. 259/PMK.07/2015 Tgl 31 Desember 2015	LEBIH BAYAR BERDASARKAN PERDIRJEN PK NO. PER-4/PK/2016 Tgl 23 Mei 2016	TOTAL REALISASI PENYALURAN DBH MIGAS TAHUN 2014	PERKIRAAN PERHITUNGAN DINASESDM	PERKIRAAN SISA DBH MIGAS	%	%
Harga Jual /ICP	(US\$)	105,00					50,99	(50,99)	0,00%	0,00%
Kurs	(Rp)	10.500,00					11.760,06	(11.760,06)	0,00%	0,00%
Lifting Migas	(Ribu. bbls)	122.814,12	120.859,18				119.433,08	1.426,10	1,62%	1,19%
DBH MIGAS RIAU	(Juta. Rp)	11.415.596,32	12.067.476,46	115.727,81	612.766,17	11.338.982,48	11.903.351,70	(564.369,22)	104,98%	-4,74%
Provinsi Riau	(Juta. Rp)	2.283.119,26	2.413.495,29	-	99.407,67	2.314.087,62	2.380.670,34	(66.582,72)	102,88%	-2,80%
1 Kab. Bengkalis	(Juta. Rp)	2.408.714,84	2.347.033,37	115.727,81	-	2.231.305,55	2.524.895,05	(293.589,49)	113,16%	-11,63%
2 Kab. Indragiri Hilir	(Juta. Rp)	415.112,59	438.817,33	-	18.074,12	420.743,20	432.849,15	(12.105,95)	102,88%	-2,80%
3 Kab. Indragiri Hulu	(Juta. Rp)	423.863,52	446.682,24	-	13.313,73	433.368,51	452.318,31	(18.949,80)	104,37%	-4,19%
4 Kab. Kampar	(Juta. Rp)	983.663,63	1.075.978,92	-	116.693,69	959.285,22	985.161,25	(25.876,03)	102,70%	-2,63%
5 Kab. Kuantan Singingi	(Juta. Rp)	415.112,59	438.817,33	-	18.074,12	420.743,20	432.849,15	(12.105,95)	102,88%	-2,80%
6 Kab. Pelalawan	(Juta. Rp)	421.590,15	441.348,64	-	5.843,23	435.505,41	461.216,64	(25.711,23)	105,90%	-5,57%
7 Kab. Rokan Hilir	(Juta. Rp)	1.158.258,46	1.341.784,61	-	146.774,49	1.195.010,12	1.227.157,15	(32.147,03)	102,69%	-2,62%
8 Kab. Rokan Hulu	(Juta. Rp)	427.653,32	456.845,03	-	20.514,43	436.330,59	448.099,43	(11.768,84)	102,70%	-2,63%
9 Kab. Siak	(Juta. Rp)	1.186.772,20	1.316.011,57	-	131.102,15	1.184.909,42	1.218.549,08	(33.639,66)	102,84%	-2,76%
10 Kota Dumai	(Juta. Rp)	415.112,59	438.817,33	-	18.074,12	420.743,20	432.849,15	(12.105,95)	102,88%	-2,80%
11 Kota Pekanbaru	(Juta. Rp)	415.112,59	438.817,33	-	18.074,12	420.743,20	432.849,15	(12.105,95)	102,88%	-2,80%
12 Kab. Kepulauan Meranti	(Juta. Rp)	461.510,57	473.027,50	-	6.820,28	466.207,22	473.887,83	(7.680,61)	101,65%	-1,62%

SKEMA EVALUASI PERKIRAAN PERHITUNGAN DBH MIGAS TAHUN 2015



LIFTING

120.399.008,01 (bbbls)

GROSS REV

6.110.063.728,83 (US\$)

ICP

50,71 US\$

KURS

Rp. 13.320,6

BAG. INDONESIA

62.489.762,97 (bbbls)

3.169.178.738,99 (US\$)

BAG. INDONESIA + DMO

Rp. 42.215.362.310.569,00

DMO

Rp. 3.164.503.541.654,17

OVER/UNDERLIF

Rp. 6.968.138.414.938,70

KOMPONEN PENGURANG

FEE PJ : Rp. 454.552.477.000,00

PPN : Rp. 1.385.354.536.257,72

PBB : Rp. 3.981.494.984.553,05

PDRD : Rp. 36.706.299.652,69

PNBP (NETO)

Rp. 40.186.314.739.109,10

BAGIAN PUSAT (85 %)

Rp. 34.158.367.528.242,70

PROVINSI (3 %)

Rp. 1.245.775.756.912,38

KAB. PENGHASIL (6 %)

1. KAB. BENGKALIS :
Rp. 1.451.535.822.958,52

2. KAB. INDRAGIRI HULU :
Rp. 226.504.683.074,98

3. KAB. KAMPAR :
Rp. 486.025.563.656,56

4. KAB. PELALAWAN :
Rp. 232.710.653.113,52

5. KAB. ROKAN HILIR :
Rp. 623.254.012.161,11

6. KAB. ROKAN HULU :
Rp. 231.467.842.119,46

7. KAB. SIAK :
Rp. 593.338.141.857,49

8. KAB. KEP MERANTI :
Rp. 227.182.875.742,27

KAB. LAINNYA (6 %)

1. KAB. INDRAGIRI HILIR :
Rp. 226.504.683.074,98

2. KAB. KUANTAN SINGINGI :
Rp. 226.504.683.074,98

3. KOTA DUMAI :
Rp. 226.504.683.074,98

4. KOTA PEKANBARU :
Rp. 226.504.683.074,98

BAG. KONTRAKTOR

57.909.246,05 (bbbls)

2.949.965.435,23 (US\$)

HASIL PERKIRAAN PERHITUNGAN DBH MIGAS PERIODE (DESEMBER 2014-DESEMBER 2015) TAHUN 2015

URAIAN	SATUAN	PERUBAHAN PMK NO. 250/PMK.07/2015 Tanggal 8 Des 2015	KURANG BAYAR BERDASARKAN PMK No. 162/PMK.07/2016 Tanggal 28 Okt 2016	KURANG BAYAR BERDASARKAN PMK No. 19/PMK.07/2017 Tanggal 16 Feb 2017	TOTAL REALISASI PENYALURAN DBH MIGAS TAHUN 2015	PERKIRAAN PERHITUNGAN DINAS ESDM	PERKIRAAN SISA DBH MIGAS	%
Harga Jual /ICP	(US\$)					39,64		0,00%
Kurs	(Rp)					13.436,00		0,00%
Lifting Migas	(Ribu. bbls)					98.892,76		0,00%
DBH MIGAS RIAU	(Juta. Rp)	4.513.812,27	919.143,53	794.695,85	6.227.651,65	6.228.878,78	(1.227,13)	-0,02%
Provinsi Riau	(Juta. Rp)	902.763,05	183.828,71	158.939,17	1.245.530,93	1.245.775,76	(244,83)	-0,02%
1 Kab. Bengkalis	(Juta. Rp)	1.001.813,42	241.388,18	208.704,05	1.451.905,65	1.451.535,82	369,83	0,03%
2 Kab. Indragiri Hilir	(Juta. Rp)	164.135,74	33.423,40	28.898,03	226.457,17	226.504,68	(47,51)	-0,02%
3 Kab. Indragiri Hulu	(Juta. Rp)	165.529,13	32.249,89	27.885,00	225.664,01	231.569,38	(5.905,37)	-2,62%
4 Kab. Kampar	(Juta. Rp)	368.401,31	64.132,75	55.449,28	487.983,35	486.025,56	1.957,78	0,40%
5 Kab. Kuantan Singingi	(Juta. Rp)	164.138,74	33.423,40	28.898,03	226.460,17	226.504,68	(44,51)	-0,02%
6 Kab. Pelalawan	(Juta. Rp)	165.773,78	32.472,67	28.076,56	226.323,01	232.710,65	(6.387,64)	-2,82%
7 Kab. Rokan Hilir	(Juta. Rp)	470.212,46	91.403,53	79.027,56	640.643,55	623.254,01	17.389,54	2,71%
8 Kab. Rokan Hulu	(Juta. Rp)	167.723,09	32.171,48	27.815,63	227.710,20	231.467,84	(3.757,64)	-1,65%
9 Kab. Siak	(Juta. Rp)	450.905,34	76.671,11	66.289,93	593.866,38	593.338,14	528,24	0,09%
10 Kota Dumai	(Juta. Rp)	164.138,74	33.423,40	28.898,03	226.460,17	226.504,68	(44,51)	-0,02%
11 Kota Pekanbaru	(Juta. Rp)	164.138,74	33.423,40	28.898,03	226.460,17	226.504,68	(44,51)	-0,02%
12 Kab. Kepulauan Meranti	(Juta. Rp)	164.138,74	31.131,60	26.916,55	222.186,89	227.182,88	(4.995,99)	-2,25%

- Sehubungan dengan dikeluarkannya PMK 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus maka data realisasi lifting migas kumulatif s.d. Triwulan II tahun 2016, periode pelaporan telah disesuaikan Januari s.d. Juni 2016.
- Realisasi lifting migas bulan Desember 2015 yang telah disampaikan dalam Rekonsiliasi Realisasi Lifting Migas Triwulan I Tahun 2016, telah diperhitungkan sebagai dasar penghitungan DBH Migas Tahun 2015 (periode Desember 2014 s.d. Desember 2015) oleh Kementerian Keuangan cq Ditjen Perimbangan Keuangan.

SKEMA EVALUASI PERKIRAAN PERHITUNGAN DBH MIGAS TAHUN 2016



LIFTING

88.472.220,72 (bbbls)

GROSS REV

4.510.873.240,54 (US\$)

ICP

50,99 US\$

KURS

Rp.13.401,2

BAG. INDONESIA

44.454.854,41 (bbbls)

2.257.367.901,31 (US\$)

BAG. INDONESIA + DMO

Rp. 30.251.438.719.036,30

DMO

Rp. 31.150.687.291.327,28

OVER/UNDERLIF

Rp. 2.920.092.381.102,48

KOMPONEN PENGURANG

FEE PJ : Rp. 413.273.123.500,00

PPN : Rp. 1.351.497.047.888,80

PBB : Rp. 2.634.470.641.924,95

PDRD : Rp. 36.690.310.200,49

PNBP (NETO)

Rp. 25.594.293.826.980,10

BAGIAN PUSAT (85 %)

Rp. 21.755.149.752.933,10

PROVINSI (3 %)

Rp. 678.254.985.323,77

KAB. PENGHASIL (6 %)

1. KAB. BENGKALIS :
Rp. 710.526.789.280,82

2. KAB. INDRAGIRI HULU :
Rp. 124.861.826.579,26

3. KAB. KAMPAR :
Rp. 281.783.377.511,65

4. KAB. PELALAWAN :
Rp. 125.457.563.075,86

5. KAB. ROKAN HILIR :
Rp. 380.991.113.598,01

6. KAB. ROKAN HULU :
Rp. 126.861.868.991,80

7. KAB. SIAK :
Rp. 338.745.373.876,34

8. KAB. KEP MERANTI :
Rp. 130.515.675.418,60

KAB. LAINNYA (6 %)

1. KAB. INDRAGIRI HILIR :
Rp. 123.319.088.240,69

2. KAB. KUANTAN SINGINGI :
Rp. 123.319.088.240,69

3. KOTA DUMAI :
Rp. 123.319.088.240,69

4. KOTA PEKANBARU :
Rp. 123.319.088.240,69

BAG. KONTRAKTOR

44.017.366,31 (bbbls)

2.268.480.511,07 (US\$)

HASIL PERKIRAAN PERHITUNGAN DBH MIGAS

PERIODE (JANUARI-DESEMBER 2016)

TAHUN 2016

URAIAN	SATUAN	PERPRES No.137/2015 Tgl 27 Nov 2015	PERPRES No.66/2016 Tgl 29 Jul 2016	PMK No.208/PMK.07/2016 Tgl 8 Des 2016	LEBIH BAYAR BERDASARKAN PMK NO. 187/PMK.07/2017 Tgl 8 Des 2017	TOTAL REALISASI PENYALURAN DBH MIGAS TAHUN 2016	PERKIRAAN PERHITUNGAN DINASESDM	PERKIRAAN SISA DBH MIGAS	%	%
Harga Jual /ICP	(US\$)	50,00	40,00	40,00			39,64	0,36		0,91%
Kurs	(Rp)	13.900,00	13.500,00	13.500,00			13.346,00	154,00		1,15%
Lifting Migas	(Ribu. bbls)	99.465,39	99.307,08	99.307,08			98.892,76	414,32		0,42%
DBH MIGAS RIAU	(Juta. Rp)	4.808.825,75	4.094.203,06	3.275.362,44	932.317,64	2.343.044,80	3.391.274,93	(1.048.230,13)	144,74%	-30,91%
Provinsi Riau	(Juta. Rp)	961.765,15	818.840,61	655.072,49	186.557,92	468.514,57	678.254,99	(209.740,42)	144,77%	-30,92%
1 Kab. Bengkalis	(Juta. Rp)	1.056.166,41	899.213,23	719.370,59	283.395,08	435.975,51	710.526,79	(274.551,28)	162,97%	-38,64%
2 Kab. Indragiri Hilir	(Juta. Rp)	174.866,39	148.880,11	119.104,09	33.919,62	85.184,47	123.319,09	(38.134,62)	144,77%	-30,92%
3 Kab. Indragiri Hulu	(Juta. Rp)	180.309,70	153.514,51	122.811,61	37.619,04	85.192,57	124.861,83	(39.669,26)	146,56%	-31,77%
4 Kab. Kampar	(Juta. Rp)	391.310,47	333.159,19	266.527,36	57.160,44	209.366,91	281.783,38	(72.416,47)	134,59%	-25,70%
5 Kab. Kuantan Singingi	(Juta. Rp)	174.866,39	148.880,11	119.104,09	33.447,66	85.656,43	123.319,09	(37.662,66)	143,97%	-30,54%
6 Kab. Pelalawan	(Juta. Rp)	179.565,14	152.880,60	122.304,48	37.117,19	85.187,29	125.457,56	(40.270,27)	147,27%	-32,10%
7 Kab. Rokan Hilir	(Juta. Rp)	498.370,77	424.309,64	339.447,71	51.770,80	287.676,91	380.991,11	(93.314,20)	132,44%	-24,49%
8 Kab. Rokan Hulu	(Juta. Rp)	179.667,97	152.968,15	122.374,52	34.447,66	87.926,86	126.861,87	(38.935,01)	144,28%	-30,69%
9 Kab. Siak	(Juta. Rp)	482.822,89	411.072,27	328.857,82	77.818,86	251.038,96	338.745,37	(87.706,41)	134,94%	-25,89%
10 Kota Dumai	(Juta. Rp)	174.866,39	148.880,11	119.104,09	33.919,62	85.184,47	123.319,09	(38.134,62)	144,77%	-30,92%
11 Kota Pekanbaru	(Juta. Rp)	174.866,39	148.880,11	119.104,09	33.919,62	85.184,47	123.319,09	(38.134,62)	144,77%	-30,92%
12 Kab. Kepulauan Meranti	(Juta. Rp)	179.381,68	152.724,40	122.179,52	31.224,13	90.955,39	130.515,68	(39.560,29)	143,49%	-30,31%

SKEMA EVALUASI PERKIRAAN PERHITUNGAN DBH MIGAS TAHUN 2017



LIFTING

98.892.755,91 (bbbls)

GROSS REV

3.920.542.969,93(US\$)

ICP

39,64 US\$

KURS

Rp.13.436

BAG. INDONESIA

44.229.541,04 (bbbls)

1.790.090.436,28 (US\$)

BAG. INDONESIA + DMO

Rp. 24.052.013.119.981,70

DMO

Rp. 1.928.546.456.540,63

OVER/UNDERLIF

Rp. 3.909.175.223.046,12

KOMPONEN PENGURANG

FEE PJ : Rp. 338.664.895.000,00

PPN : Rp. 1.137.096.795.228,85

PBB : Rp. 2.674.459.707.565,69

PDRD : Rp. 35.658.220.806,87

PNBP (NETO)

Rp. 21.879.193.074.960,40

BAGIAN PUSAT (85 %)

Rp. 18.597.314.113.716,30

PROVINSI (3 %)

Rp. 793.423.108.636,38

KAB.PENGHASIL (6 %)

1. KAB. BENGKALIS :
Rp. 807.607.591.032,41

2. KAB. INDRAGIRI HULU :
Rp. 147.797.174.724,36

3. KAB. KAMPAR :
Rp. 330.632.374.942,85

4. KAB. PELALAWAN :
Rp. 148.436.789.670,05

5. KAB. ROKAN HILIR :
Rp. 468.121.316.889,94

6. KAB. ROKAN HULU:
Rp. 148.572.720.716,77

7. KAB. SIAK :
Rp. 397.526.331.913,37

8. KAB. KEP MERANTI :
Rp. 147.863.146.556,59

KAB. LAINNYA (6 %)

1. KAB. INDRAGIRI HILIR :
Rp. 144.258.747.024,80

2. KAB. KUANTAN SINGINGI :
Rp. 144.258.747.024,80

3. KOTA DUMAI :
Rp. 144.258.747.024,80

4. KOTA PEKANBARU :
Rp. 144.258.747.024,80

BAG. KONTRAKTOR

54.663.214,88 (bbbls)

2.143.132.777,87(US\$)

HASIL PERKIRAAN PERHITUNGAN DBH MIGAS PERIODE (JANUARI-DESEMBER 2017) TAHUN 2017

URAIAN	SATUAN	PERPRES No.97/2016 Tgl 30 Nov 2016	PERPRES No.86/2017 Tgl 30 Agust 2017	PMK No.187 /PMK.07/2017 TGL 8 Des 2017	PERKIRAAN PERHITUNGAN DINASESDM	PERKIRAAN SISA DBH MIGAS	%	%	%
Harga Jual /ICP	(US\$)	45,00	48,00	48,00	50,99	(2,99)	-6,25%	0,00%	-5,86%
Kurs	(Rp)	13.300,00	13.400,00	13.400,00	13.401,20	(1,20)	-0,75%	0,00%	-0,01%
Lifting Migas	(Ribu. bbls)	91.612,20	91.428,65	91.428,65	88.472,22	2.956,43	0,20%	0,00%	3,34%
DBH MIGAS RIAU	(Juta. Rp)	3.507.470,59	4.020.093,27	2.843.646,30	3.967.115,54	(1.123.469,25)	-12,75%	41,37%	-28,32%
Provinsi Riau	(Juta. Rp)	701.494,12	804.018,65	562.813,06	793.423,11	(230.610,05)	-12,75%	42,86%	-29,07%
1 Kab. Bengkalis	(Juta. Rp)	735.178,74	842.626,34	589.838,44	807.607,59	(217.769,15)	-12,75%	42,86%	-26,96%
2 Kab. Indragiri Hilir	(Juta. Rp)	127.544,39	146.185,21	102.329,65	144.258,75	(41.929,10)	-12,75%	42,86%	-29,07%
3 Kab. Indragiri Hulu	(Juta. Rp)	130.901,23	150.032,66	105.022,86	147.797,17	(42.774,31)	-12,75%	42,86%	-28,94%
4 Kab. Kampar	(Juta. Rp)	289.874,45	332.240,08	236.689,54	330.632,37	(93.942,84)	-12,75%	40,37%	-28,41%
5 Kab. Kuantan Singingi	(Juta. Rp)	127.544,39	146.185,21	102.329,65	144.258,75	(41.929,10)	-12,75%	42,86%	-29,07%
6 Kab. Pelalawan	(Juta. Rp)	131.430,11	150.638,84	105.447,19	148.436,79	(42.989,60)	-12,75%	42,86%	-28,96%
7 Kab. Rokan Hilir	(Juta. Rp)	392.301,72	449.637,27	336.010,98	468.121,32	(132.110,34)	-12,75%	33,82%	-28,22%
8 Kab. Rokan Hulu	(Juta. Rp)	133.153,18	152.613,74	106.829,62	148.672,72	(41.843,10)	-12,75%	42,86%	-28,14%
9 Kab. Siak	(Juta. Rp)	355.415,12	407.359,63	289.346,37	397.526,33	(108.179,96)	-12,75%	40,79%	-27,21%
10 Kota Dumai	(Juta. Rp)	127.544,39	146.185,21	102.329,65	144.258,75	(41.929,10)	-12,75%	42,86%	-29,07%
11 Kota Pekanbaru	(Juta. Rp)	127.544,39	146.185,21	102.329,65	144.258,75	(41.929,10)	-12,75%	42,86%	-29,07%
12 Kab. Kepulauan Meranti	(Juta. Rp)	127.544,39	146.185,21	102.329,65	147.863,15	(45.533,50)	-12,75%	42,86%	-30,79%

REKAPITULASI TOTAL REALISASI PENYALURAN DBH MIGAS TAHUN 2013-2017

URAIAN	REALISASI PENYALURAN DBH MIGAS				PMK No.187 /PMK.07/2017 Tgl 8 Des 2017	TOTAL REALISASI PENYALURAN DBH MIGAS
	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL 2013-2017
DBH MIGAS RIAU	11.608.532,82	11.338.982,46	6.227.651,65	2.343.044,81	2.843.646,30	34.361.858,04
Provinsi Riau	2.321.706,56	2.314.087,62	1.245.530,93	468.514,57	562.813,06	6.912.652,74
1 Kab. Bengkalis	2.495.654,00	2.231.305,55	1.451.905,65	435.975,51	589.838,44	7.204.679,15
2 Kab. Indragiri Hilir	422.128,47	420.743,20	226.457,17	85.184,47	102.329,65	1.256.842,96
3 Kab. Indragiri Hulu	434.982,16	433.368,51	225.664,01	85.192,57	105.022,86	1.284.230,11
4 Kab. Kampar	979.364,62	959.285,22	487.983,35	209.366,91	236.689,54	2.872.689,64
5 Kab. Kuantan Singingi	422.128,47	420.743,20	226.460,17	85.656,43	102.329,65	1.257.317,92
6 Kab. Pelalawan	437.347,84	435.505,41	226.323,01	85.187,29	105.447,19	1.289.810,74
7 Kab. Rokan Hilir	1.138.037,45	1.195.010,12	640.643,55	287.676,91	336.010,98	3.597.379,01
8 Kab. Rokan Hulu	433.162,95	436.330,59	227.710,20	87.926,86	106.829,62	1.291.960,22
9 Kab. Siak	1.212.836,17	1.184.909,42	593.866,38	251.038,96	289.346,37	3.531.997,30
10 Kota Dumai	422.128,47	420.743,20	226.460,17	85.184,47	102.329,65	1.256.845,96
11 Kota Pekanbaru	422.128,47	420.743,20	226.460,17	85.184,47	102.329,65	1.256.845,96
12 Kab. Kepulauan Meranti	466.927,19	466.207,22	222.186,89	90.955,39	102.329,65	1.348.606,34

REKAPITULASI TOTAL PERKIRAAN REALISASI PERHITUNGAN DBH MIGAS TAHUN 2013-2017

URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN PERHITUNGAN REALISASI DBH MIGAS OLEH DINAS ESDM					
		2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL 2013-2017
Harga Jual /ICP	(US\$)	106,55	101,09	50,71	39,64	50,99	
Kurs	(Rp)	10.217,64	11.760,06	13.320,60	13.346,00	13.401,20	
Lifting Migas	(Ribu. bbls)	126.556.611,00	119.433.077,74	111.064,88	98.892,76	88.472,22	
DBH MIGAS RIAU	(Juta. Rp)	11.611.975,10	11.903.351,70	5.388.469,69	3.391.274,93	3.967.115,54	36.262.186,96
Provinsi Riau	(Juta. Rp)	2.322.395,02	2.380.670,34	1.077.693,94	678.254,99	793.423,11	7.252.437,39
1 Kab. Bengkalis	(Juta. Rp)	2.495.779,18	2.524.895,05	1.171.343,36	710.526,79	807.607,59	7.710.151,97
2 Kab. Indragiri Hilir	(Juta. Rp)	422.253,64	432.849,15	195.944,35	123.319,09	144.258,75	1.318.624,98
3 Kab. Indragiri Hulu	(Juta. Rp)	435.467,20	452.318,31	198.161,40	124.861,83	147.797,17	1.358.605,91
4 Kab. Kampar	(Juta. Rp)	979.489,79	985.161,25	440.204,66	281.783,38	330.632,37	3.017.271,46
5 Kab. Kuantan Singingi	(Juta. Rp)	422.253,64	432.849,15	195.944,35	123.319,09	144.258,75	1.318.624,98
6 Kab. Pelalawan	(Juta. Rp)	438.364,89	461.216,64	199.076,23	125.457,56	148.436,79	1.372.552,11
7 Kab. Rokan Hilir	(Juta. Rp)	1.138.162,63	1.227.157,15	569.788,37	380.991,11	468.121,32	3.784.220,57
8 Kab. Rokan Hulu	(Juta. Rp)	433.288,12	448.099,43	200.162,21	126.861,87	148.672,72	1.357.084,36
9 Kab. Siak	(Juta. Rp)	1.212.961,34	1.218.549,08	542.677,29	338.745,37	397.526,33	3.710.459,43
10 Kota Dumai	(Juta. Rp)	422.253,64	432.849,15	195.944,35	123.319,09	144.258,75	1.318.624,98
11 Kota Pekanbaru	(Juta. Rp)	422.253,64	432.849,15	195.944,35	123.319,09	144.258,75	1.318.624,98
12 Kab. Kepulauan Meranti	(Juta. Rp)	467.052,37	473.887,83	205.584,82	130.515,68	147.863,15	1.424.903,85

TOTAL SELISIH PERHITUNGAN DBH MIGAS TAHUN 2013-2017

URAIAN	TOTAL REALISASI PENYALURAN DBH MIGAS TAHUN 2013-2017	TOTAL PERKIRAAN REALISASI PERHITUNGAN DBH MIGAS OLEH DINAS ESDM TAHUN 2013-2017	SELISIH
DBH MIGAS RIAU	34.361.858,04	36.262.186,97	(1.900.328,93)
Provinsi Riau	6.912.652,74	7.252.437,39	(339.784,65)
1 Kab. Bengkalis	7.204.679,15	7.710.151,97	(505.472,82)
2 Kab. Indragiri Hilir	1.256.842,96	1.318.624,98	(61.782,02)
3 Kab. Indragiri Hulu	1.284.230,11	1.358.605,91	(74.375,80)
4 Kab. Kampar	2.872.689,64	3.017.271,46	(144.581,82)
5 Kab. Kuantan Singingi	1.257.317,92	1.318.624,98	(61.307,06)
6 Kab. Pelalawan	1.289.810,74	1.372.552,11	(82.741,37)
7 Kab. Rokan Hilir	3.597.379,01	3.784.220,57	(186.841,56)
8 Kab. Rokan Hulu	1.291.960,22	1.357.084,36	(65.124,14)
9 Kab. Siak	3.531.997,30	3.710.459,43	(178.462,13)
10 Kota Dumai	1.256.845,96	1.318.624,98	(61.779,02)
11 Kota Pekanbaru	1.256.845,96	1.318.624,98	(61.779,02)
12 Kab. Kepulauan Meranti	1.348.606,34	1.424.903,85	(76.297,51)



MASIH ADA SELISIH DBH MIGAS TAHUN 2013-2017 SEBESAR RP. 1.900.328.930.000,00-BERDASARKAN PERKIRAAN REALISASI PERHITUNGAN DINAS ESDM PROV. RIAU SEBESAR RP. 36.262.186.970.000,00- SEDANGKAN REALISASI PENYALURAN DBH MIGAS SETELAH DI TAMBAH KURANG SALUR DAN DI VERIFIKASI LEBIH SALUR SEBESAR RP. 34.361.858.040.000,00-, KARENA PEMERINTAH (KEMENKEU) BELUM MENETAPKAN KETETAPAN RAMPUNG DBH MIGAS SEJAK TAHUN 2013-2017;



SELISIH PBB MIGAS TAHUN 2013-2017 TOTAL SEBESAR RP. 2.056.823.610.000,00- SEBAGAI KOMPONEN PENGURANG DALAM PERHITUNGAN DBH MIGAS SEBESAR RP. 15.619.204.860.000,00-, SEDANGKAN REALISASI PENYALURAN DBH PAJAK PBB MIGAS SEBESAR RP. 12.000.460.770.000,00- (76,83%) KETENTUAN YANG BERLAKU 90% DAN BAGIAN PEMERINTAH 10%, YAITU SEBESAR RP. 1.561.920.490.000,00-



BESARAN PUNGUTAN LAINNYA SEPERTI FEE PENJUALAN TAHUN 2013-2017 TOTAL SEBESAR RP. 2.240.707.050.000,00-, BELUM TRANSPARAN, SEDANGKAN PDRD SEBESAR RP. 221.489.570.000,00- MERUPAKAN PAJAK DAERAH SEBAGAI KOMPONEN PENGURANG NAMUN SAMPAI SAAT INI BELUM JELAS PENYELESAIANNYA. SEDANGKAN PPN SEBESAR RP. 6.239.431.780.000.000,00- SEBAGAI KOMPONEN PENGURANG BELUM TRANSPARAN PENETAPAN KARENA WK. MIGAS DI RIAU SUDAH AKAN BERAKHIR MASA KONTRAKNYA.



HARAPAN DAERAH

1. Daerah yang Memiliki SDA Memperoleh Kompensasi yang Proporsional Sebagai akibat Eksploitasi dari SDA Yang Tidak Bisa Diperbaharui.
2. Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
 - ✓ Sejak Tahun 2014, Pemerintah (Kemenkeu) Tidak Pernah Melakukan Rekonsiliasi Penghitungan DBH SDA Migas, sesuai amanat Pasal 28 Ayat (1) PP 55/2005 Tentang Dana Perimbangan, Apabila Pemerintah (Kemenkeu) merasa berat melaksanakannya , maka rincian Komponen Pajak (Ppn, Pbb Dan Pdrd) Dan Pungutan Lainnya (Fee Penjualan), Over/Under Lifting, Dan DMO agar disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah penghasil supaya bisa dihitung DBH MIGAS masing-masing daerah.
 - ✓ Penyaluran Dilakukan Secara Tepat Waktu.
 - ✓ Transparansi Dalam Perhitungan Penetapan Alokasi Untuk Daerah.
 - ✓ Konsistensi Dalam Perhitungan Pembebanan Pajak dan Komponen Pengurang lainnya.
3. Diperlukan Penguatan Sumber Keuangan Daerah Dapat Melalui;
 - ✓ Pengalihan PBB Migas dan PPh Migas menjadi Pajak Daerah
 - ✓ Bagi Hasil PPN Kepada Daerah, Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan
 - ✓ Bagi hasil pajak ekspore CPO kepada Daerah



**Rapat Persiapan Penyaluran Dana Transfer 2018, tanggal 6 Maret 2018
di Ruang Multimedia Bapenda Provinsi Riau**



Rapat Penyaluran Dana Transfer 2018, tanggal 9 Maret 2018 di Ruang Rapat Kediaman Sekretaris Daerah Provinsi Riau





**Rapat Teknis Tindak Lanjut Penyaluran Dana Transfer Pusat ke Daerah 2018,
tanggal 15 Maret 2018
di Ruang Cempaka Bapenda Provinsi Riau**



**Rapat Penyaluran Dana Transfer Pusat ke Daerah 2018,
tanggal 27 Maret 2018
di Ruang Rapat Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan RI**



Rapat Penyaluran Dana Transfer Pusat ke Daerah 2018,
tanggal 26 Maret 2018
di Ruang Rapat Deputy V Kementerian Koordinator Perekonomian RI



Rapat Penyaluran Dana Transfer Pusat ke Daerah 2018,
tanggal 27 Maret 2018
di Ruang Rapat Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan RI



SEKIAN TERIMA KASIH

